



BUPATI BANGKA BARAT

Yth 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekda
3. Kepala OPD/Unit Kerja
se-Kabupaten Bangka Barat
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/1/SETDA/IV TAHUN 2024

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) /
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 800.1.11/37/IRDA /2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemenuhan Data Dukung MCP KPK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, Surat LKPP RI Nomor 32740/D.4.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangka Barat menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) melalui Surat Keputusan Kepala OPD dan Surat Keputusan tersebut disampaikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Barat;
2. Setiap OPD/Unit Kerja agar segera melakukan penginputan RUP berdasarkan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - (a) Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diinput adalah belanja barang/jasa yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa termasuk belanja operasional, belanja modal, belanja lain (belanja tidak terduga, belanja bansos atau belanja hibah);
 - (b) Dalam penginputan RUP diimbau untuk mengisi keterangan penandaan PDN /non PDN pada informasi belanja barang/jasa dimaksud;
 - (c) Rekapitulasi hasil penginputan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP agar dicetak dan ditandatangani oleh kepala OPD, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bangka Barat c.q. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bangka Barat sebelum tanggal 1 Maret 2025;
 - (d) Bagi OPD/Unit Kerja yang belum menyelesaikan penginputan RUP dan belum menyampaikan rekapitulasi RUP sampai tanggal 1 Maret 2025, maka akan dilakukan penonaktifan terhadap akun RUP OPD/Unit Kerja. Pengaktifan kembali akun akan dilakukan setelah OPD/Unit Kerja ybs menyampaikan surat permohonan Kepada Bupati Bangka Barat disertai alasan keterlambatan penginputan RUP;
3. Menindaklanjuti Inpres nomor 2 tahun 2022, maka setiap OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diimbau untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan 95% dari APBD untuk menggunakan Produk Dalam negeri (PDN) dan 40% dari APBD untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dari hasil produksi dalam negeri;
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023, maka setiap OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diimbau untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan minimal 30% dari APBD melalui *e-Purchasing*-*Katalog*.
5. Setiap OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-K) yang bergabung dan menayangkan produknya dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah

Kabupaten Bangla Barat, serta mengutamakan belanja barang/jasa hasil Produk Hasil Dalam Negeri (PDN) dalam Katalog Elektronik Lokal;

6. Menindaklanjuti hasil MCP KPK RI maka diimbau kepada semua OPD lingkup Kabupaten Bangka Barat untuk:
 - (a) Menginventarisasi kegiatan/sub kegiatan/paket pengadaan barang/jasa yang sekiranya dapat diusulkan sebagai salah satu 10 Proyek Strategis Pemda tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (b) Terhadap 10 proyek strategis pemda tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar OPD yang bersangkutan melakukan reviu kontrak dengan bagian hukum Sekretariat Daerah.
 - (c) Kepada APIP agar melaksanakan reviu HPS terhadap pengadaan barang/jasa pada 10 Proyek Strategis Pemda tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - (d) Mengimbuu agar PPK semua OPD/Unit Kerja lingkup Kabupaten Bangka Barat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa terutama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa rutin, misalnya: Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, dst;
7. Masing masing OPD/Unit kerja diimbau untuk segera membentuk tim Pengelola Pengadaan (PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan dan tim pejabat berwenang lainnya), serta menyampaikan Surat Keputusan terkait ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Barat;
8. Dokumen Persiapan Pengadaan yang dilakukan melalui proses Tender/Seleksi, terutama yang menggunakan anggaran DAK/DABA agar segera disampaikan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan tender/seleksi dini;
9. Setiap OPD/Unit Kerja agar menggunakan aplikasi Non Tender SPSE versi 4.5 untuk melakukan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
10. Mengimbuu kepada setiap PPK agar menyelesaikan semua paket pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE baik pengadaan melalui penyedia (Tender, Tender Cepat, Seleksi, e-Purchasing, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan langsung) maupun swakelola (pencatatan swakelola), serta melakukan pencatatan Non Tender pembelian langsung dengan melakukan upload bukti pembelian/pembayaran dan kwitansi non transaksional;
11. PPK diwajibkan melakukan pengisian E-Kontrak setelah proses penandatanganan kontrak selesai;

12. Untuk membantu percepatan penginputan SiRUP, Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah membentuk dan menugaskan personil yang bertugas melakukan pendampingan penginputan RUP (terlampir);
13. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 800.1.11/37/IRDA/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemenuhan data Dukung MCP KPK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, Surat LKPP RI Nomor 32740/D.4.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (terlampir);
14. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok

Pada tanggal 30 Desember 2024

RIIPATI RANGKA BARAT



H. SUKIRMAN, S.H.

Lampiran I Surat Edaran Bupati Bangka Barat
Nomor : 100.3.4/1/SETDAIV Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

PERSONIL PENDAMPING PENGINPUTAN RUP TAHUN 2025

NO	NAMA OPD	TIM PENDAMPING
1.	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Gitaria Erisa,SST• Muhammad Iqbal, S.AP
2.	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none">• Lailin Khasanatin, S. HI• Serepina Ernawaty Pardede, S.P
3.	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Lailin Khasanatin, S.HI• Serepina Ernawaty Pardede, S.P
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Ervina Vivianila, S.Pi., M.Eng• Ira Evita Putri Utami, S.M
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Helen Effendi, S.Akt• Siska Farichah, S.T.
6.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Helen Effendi, S.Akt• Siska Farichah, S.T.
7.	Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Kristian, S.AP• Mardianto Gustian, S.E.
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none">• Zulkifli, A.Md• Rizky Buana Pratama, S.E.
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Zulkifli, A.Md• Mardianto Gustian, S.E.
10.	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Ervina Vivianila, S.Pi., M.Eng• Mardianto Gustian, S.E.
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Undat P. Sihombing A.Md• Kristian, S.AP
12.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Undat P. Sihombing A.Md• Kristian, S.AP

13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Lailin Khasanatin, S.HI • Ira Evita Putri Utami, S.M
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Ira Evita Putri Utami, S.M
15.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Serepina Ernawaty Pardede, S.P • Siska Farichah, ST
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Rizky Buana Pratama, S.E
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Gitaria Erisa, S.ST
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • Helen Effendi, S.Akt • Ika Octaria Pratiwi, S.T
19.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Rizky Buana Pratama, S.E
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Rizky Buana Pratama, SE • Ika Octaria Pratiwi, S. T
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Iqbal, S.AP • Zulkifli, A.Md
22.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Ervina Vivianila, S.Pi., M.Eng • Lailin Khasanatin, S.HI
23.	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Gitaria Erisa, S.ST
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Iqbal, S.AP • Mardianto Gustian, S.E
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Lailin Khasanatin, S.HI • Zulkifli, A.Md
26.	Kecamatan Jebus	<ul style="list-style-type: none"> • Ira Evita Putri Utami, SM • Siska Farichah, ST
27.	Kecamatan Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Ira Evita Putri Utami, SM • Helen Effendi, S.Akt
28.	Kecamatan Mentok	<ul style="list-style-type: none"> • Ervina Vivianila, S.Pi., M.Eng

		<ul style="list-style-type: none"> • Ika Octaria Pratiwi,ST
29.	Kecamatan Parit Tiga	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Kristian, S.AP
30.	Kecamatan Simpang Teritip	<ul style="list-style-type: none"> • Lailin Khasanatin, S.HI • Ika Octaria Pratiwi, S.T
31.	Kecamatan Tempilang	<ul style="list-style-type: none"> • Undat P. Sihombing A.Md • Rizky Buana Pratama, S.E
32.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Risky Buana Pratama, SE • Ika Octaria Pratiwi, S.T

BUPATI BANGKA BARAT



H. SUKIRMAN, S.H.

Lampiran II Surat Edaran Bupati Bangka Barat
Nomor : 100.3.4/1/SETDAIV Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

**CONTOH SURAT PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SiRUP)**

Nomor : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) (nama OPD) menunjuk

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
No Hp :

Sebagai Administrator (Admin) SiRUP dan atas nama (nama OPD) dalam rangka melakukan:

1. Membantu Pengguna Anggaran dalam Penggunaan Aplikasi SiRUP;
2. Identifikasi Pemaketan;
3. Membuat Paket Penyedia, Swakelola dan Penyedia Dalam Swakelola;
4. Ubah paket yang belum diumumkan.

Demikian surat penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

... (tempat)....,(tanggal).....
(Nama Pemberi Tugas)

Admin,
Pengguna Anggaran (Nama OPD)

DOKUMENTASI PENDAMPINGAN INPUT RUP TA 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Daya Baru - Mentok
Telp.(0716) 7323046 Fax.(0716) 7323005

PENCAPAIAN REKAP APBD 2025 RUP TERUMUMKAN

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu Belanja (Barang/Jasa + Belanja Modal)	Total RUP Terumumkan	Selisih	Persentase RUP PD	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,123,379,508	2,123,379,508	O	100%	
2	BKPSDMD	2,868,000,000	2,868,000,000	O	100%	
3	DISKOMINFO	6,183,732,900	6,183,732,900	O	100%	
4	PUSKESMAS SEKAR BIRU	749,160,000	749,160,000	O	100%	
5	DINAS PERIKANAN	2,118,279,800	2,118,279,800	O	100%	
6	Kecamatan Mentok	2,201,167,000	2,201,167,000	O	100%	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,010,495,500	4,010,495,500	O	100%	
8	Sekretariat Daerah	16,209,355,350	16,209,355,350	O	100%	
9	Puskesmas Kelapa	303,027,148	303,027,148	O	100%	
10	Puskesmas Mentok	403,956,000	403,956,000	O	100%	
11	Kec. Parit Tiga	2,097,295,000	2,097,295,000	O	100%	
12	Kec.Simpang Teritip	1,333,690,000	1,333,690,000	O	100%	
13	Puskesmas Jebus	2,048,160,000	2,048,160,000	O	100%	
14	Kecamatan Tempilang	1,951,395,000	1,951,395,000	O	100%	
15	BP2RD	3,478,008,303	3,478,008,303	O	100%	
16	Dinsos	11,991,615,126	11,991,615,126	O	100%	
17	Kesbangpol	4,128,588,400	4,128,588,400	O	100%	
18	Kecamatan Jebus	1,101,583,300	1,101,583,300	O	100%	
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,616,919,958	2,616,919,958	O	100%	
20	Puskesmas Simpang Teritip	3,060,975,000	3,060,975,000	O	100%	
21	Sekretariat DPRD	43,673,108,586	43,673,108,586	O	100%	
22	Dinas Perindustrian	1,955,353,000	1,955,353,000	O	100%	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5,813,326,000	5,813,326,000	O	100%	
24	Kelurahan Sungai Baru	803,525,000	803,525,000	O	100%	
25	Kelurahan Keranggan	575,710,000	575,710,000	O	100%	
26	Puskesmas Kundi	1,247,860,000	1,247,860,000	O	100%	
27	Baperida	4,315,092,400	4,315,092,400	O	100%	
28	Puskesmas Puput	273,300,000	273,300,000	O	100%	
29	Satpol PP	8,376,335,000	8,376,335,000	O	100%	
30	Kelurahan Menjelang	407,060,000	407,060,000	O	100%	

31	Kelurahan sungal daeng	828,570,000	828,570,000	O	100%	
32	Kelurahan Tanjung	859,205,000	859,205,000	O	100%	
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,033,306,000	3,033,306,000	O	100%	
34	Dinas Lingkungan Hidup	12,591,965,140	12,591,965,140	O	100%	
35	Puskesmas Templang	1,951,395,000	1,951,395,000	O	100%	
36	Disdukcapil	3,015,109,400	3,015,109,400	O	100%	
37	DISHUBPERKIM	21,350,121,382	21,350,121,382	O	100%	
38	DP3AP2KB	7,281,161,100	7,281,161,100	O	100%	
39	PUPR	7,026,620,000	7,026,620,000	O	100%	
40	Kecamatan Kelapa	1,298,298,000	1,298,298,000	O	100%	
41	dikpora	75,646,080,900	75,646,080,900	O	100%	
42	Kel. Kelapa	899,550,000	899,550,000	O	100%	
43	RSUD	98,660,195,599	98,660,195,599	O	100%	
44	INSPEKTORAT	2,781,988,747	2,781,988,747	O	100%	
45	BPKAD	4,440,489,000	4,440,489,000	O	100%	
46	DINKES	120,605,851,965	120,605,851,965	O	100%	
47	DKUP	7,029,000,000	7,029,000,000	O	100%	
	Jumlah	507,718,360,512	507,718,360,512		100%	

Mentok, 31 Maret 2025

Mengetahui,
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

Aidin Sellawan, ST., M.Eng
NIP. 197610162006041005